

UPAYA KE ARAH WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA; PENDEKATAN KEBIJAKAN

Oleh:

Irza Adya Sugardha

Universitas Pendidikan Indonesia

(E-mail : irza_adya@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program wajib belajar yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya program wajib belajar 12 tahun di suatu daerah Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majalengka, yang masih mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Masalah yang dimiliki Kabupaten Majalengka adalah hasil pencapaian APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan dasar dan APK pendidikan menengah yang berbeda, dimana APK pendidikan dasarnya sudah mencapai 100 persen sedangkan APK pendidikan menengahnya masih terhitung rendah yaitu 74,24 persen masih dibawah rata-rata APK Provinsi Jawa Barat yaitu 76.48. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka. Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam upaya pencapaian wajib belajar 12 tahun.

Kata Kunci: Analisis Program Wajib Belajar, Program Wajib Belajar, Wajib Belajar 12 Tahun

ABSTRACT

This study aims to analyze the existing compulsory education programs and the factors that influence the realization of the 12-year compulsory education program in West Java. This research was conducted in Majalengka District, which still proclaims a 9-year compulsory education program. The problems that determine Majalengka Regency are the awards received by the APK (Coarse Participation Figures) of basic education and the APK of different secondary education, while the APK for basic education has reached 100 percent while the APK for secondary education is still low, 74.24 percent is still below the average APK West Java Province which is 76.48. This research uses descriptive method, using qualitative design with Case Study. This research was conducted in Majalengka Regency. Methods of collecting data through interviews, documentation studies and observations. The results of this study indicate internal factors and external factors needed in this study 12 years

Keywords: Analysis of Compulsory Education Programs, Compulsory Education Programs, 12-Year Compulsory Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengembangkan suatu negara. Tentunya Indonesia yang notabennya masih merupakan negara yang sedang berkembang dan ingin menjadi negara yang lebih baik lagi. Sangat kita sadari bahwa dalam membangun suatu negeri, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan negaranya lebih baik lagi. Salah satu cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pemerintah juga mengupayakan pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan

yang dapat memberikan akses dan pemerataan perolehan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga anak usia produktif untuk sekolah tidak putus sekolah ataupun tidak sekolah (Hasanah & Jabar, 2017).

Perlu diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Hidayat

(2013) Pendidikan yang bermutu akan diperoleh pada sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Jadi pemerintah turut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, hal ini bertujuan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan mempunyai kontribusi dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan, adalah dengan mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan 1994, program diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, karena adanya krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajib akhirnya disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009. Jadi wajib belajar merupakan program yang wajib dilaksanakan apabila negara kita ingin menghasilkan SDM yang berkualitas lebih banyak lagi.

Menurut Seel (2012, 697) mengatakan bahwa "*compulsory education refers to the most crucial period of formal education required by law of all children between certain ages in a given country*". Seel menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut.

Jadi menurutnya negara harus turut serta mengatur kebijakan pendidikan di negaranya termasuk untuk mewajibkan setiap penduduknya agar turut serta mengikuti pendidikan sesuai dengan usianya.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa negara telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, hal ini dikarenakan akan kesadaran yang

sangat tinggi tentang pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Tapi, sayangnya di Indonesia belum ada payung hukum yang kuat mengenai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang kuat, maka dari itu pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengikat, agar disemua daerah serentak mencanangkan wajib belajar 12 tahun, seperti program sebelumnya, yaitu wajar dikdas 9 tahun. Tentunya hal ini bisa dimengerti terkait belum adanya payung hukum yang kuat mengenai pelaksanaan wajar 12 tahun, karena masih banyak daerah yang belum siap untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang dikarenakan program sebelumnya yaitu wajib belajar 9 tahun juga masih juga belum sepenuhnya tercapai.

Menurut Hasanah & Jabar (2017) wajib belajar merupakan salah satu dari program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tiap masing-masing negara. Wajib belajar di masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintahannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah". Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah

Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Dan apabila pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, maka tiap daerah mewajibkan setiap warganya untuk menyelesaikan pendidikannya hingga SMA atau sederajat.

Somantri (2014) mengatakan pendidikan adalah hak semua orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran”. Kesempatan telah terbuka dan peluang untuk menikmatinya telah tersedia, tetapi ternyata tidak semua orang dapat memanfaatkan peluang tersebut, terutama untuk jenjang pendidikan di atas SD. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselenggarakan, akan semakin kecil peluang bagi setiap orang untuk dapat memasukinya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi diskontinuitas dan rendahnya *transition rate* secara garis besarnya dapat dibedakan sebagai hal yang bersumber pada faktor internal dan faktor eksternal sistem pendidikan itu sendiri. Penyebab eksternal yang menonjol di antaranya faktor sosial ekonomi, budaya, demografis, serta iklim geografis yang kurang menguntungkan.

Adapun penyebab internal mencakup hal-hal yang bertalian dengan faktor hasil (*output*), antara lain ketatnya syarat kelulusan dan terbatasnya variasi jenjang dan jalur program yang ditawarkan; masukan dasar (*rawinput*) yang heterogen karakteristik dan latar belakangnya; masukan intrumental (*instrumental input*) yang terbatas, yakni kurangnya sumber belajar-mengajar (seperti buku, guru, laboratorium, serta fasilitas penunjang lainnya); faktor lingkungan; dan faktor proses, yakni kelemahan manajerial

sistem pendidikan. Upaya penanggulangan yang ditujukan ke arah pemecahan masalah eksternal telah dicoba, antara lain dengan dikembangkannya pemikiran model perencanaan pendidikan yang terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, terutama sektor ekonomi, seperti telah dirintis UNESCO (1973); dan model perencanaan operasional yang dikembangkan (Somantri, 2014).

Dalam pencapaian wajib belajar 12 tahun, tentunya terdapat indikator dalam pencapaiannya, salah satunya adalah kita dapat melihat dari APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) disuatu daerah. Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa (tanpa mempedulikan umurnya) dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu (Berlian, 2011). Sedangkan Angka partisipasi murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan (Firmansyah & Sumarno, 2013). Jadi, ketika daerah tersebut APK dan APM SD, SMP, dan SMA telah mencapai 100 persen, maka daerahnya bisa dikatakan telah mencapai wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Kemudian, selain dapat dilihat dari APK nya, ketuntasan wajib belajar 12 tahun juga bisa dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dalam dimensi rata-rata lama sekolah, jadi apabila disuatu daerah telah mencapai rata-rata lama sekolah sekitar 12 tahun, maka daerah tersebut sudah bisa dikatakan telah mencapai wajib belajar 12 Tahun.

Terdapat data dari 34 provinsi di tahun 2015 dan 2016, yang menunjukkan bahwa APK SD mengalami penurunan, dari 110,5 menjadi 109,31, kemudian APK SLTP juga mengalami penurunan dari 91,17 menjadi 90,12, dan pada

APK SMA mempunyai hasil yang berbeda dari jenjang sebelumnya, karena mengalami kenaikan, yaitu menyentuh angka dari 78.02 menjadi 80,89. Lalu untuk data angka rata-rata lama sekolah Indonesia adalah 7,73 tahun di tahun 2014 kemudian naik menjadi 7,84 Tahun di tahun 2015, ini berarti mengalami peningkatan menjadi 0,11 tahun dari tahun sebelumnya. (Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2015-2017)

Selain itu berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2017 dapat dilihat APK SD, SMP, dan SMA dari tahun 2015 hingga 2017 di Provinsi Jawa Barat dimana APK SD dan SMP mengalami penurunan pertahunnya, yaitu APK SD dari 109.42 di tahun 2015, menjadi 107.54 di tahun 2017, lalu APK SMP Jawa barat di tahun 2015 90.07 menurun menjadi 88.8 di tahun 2017, sedangkan APK SMA Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami peningkatan dari 70.23 ditahun 2015 lalu meningkat menjadi 76.48 di tahun 2017. Kemudian berbeda dengan APK, justru APM SD, SMP, dan SMA justru mengalami peningkatan dari tahun ketahun. APM SD Provinsi Jawa barat di tahun 2015 berada pada 97.68 meningkat menjadi 98.05 di tahun 2017, kemudian APM SMP dapat dilihat juga meningkat dari 79.55 di tahun 2015 meningkat menjadi 80.29 di tahun 2017, dan yang terakhir APM SMA di tahun 2015 adalah 56.73 meningkat menjadi 57.22 di tahun 2017.

Peneliti disini telah menyoroti suatu daerah di Jawa Barat yang akan di jadikan sampel, dalam upaya mewujudkan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, yaitu di Kabupaten Majalengka. Di kabupaten Majalengka dapat dilihat dari Pencapaian APK di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, memiliki hasil yang berbeda. dimana APK pendidikan dasarnya telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk jenjang

pendidikan menengahnya, masih terhitung rendah yaitu 74,24 persen masih dibawah rata-rata APK Provinsi Jawa Barat yaitu 76.48. Dengan diadakannya penelitian di daerah ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APK di Kabupaten Majalengka, khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah. Sebelum melakukan perumusan strategi dalam upaya pencapaian wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka, maka harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Gambaran pencapaian wajib belajar di Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel APK dan APM semua jenjang berikut.

Tabel 1
APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD,SMP, dan SMA sederajat Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2015/2016

SD/ MI		SLTP/ MTS		SMA/ MA	
APK	APM	APK	APM	APK	APM
109,01	96,35	100,36	82,54	63,44	43,2

(Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016)

Tabel 2
APK (Angka Partisipasi Kasar) SD,SMP, dan SMA Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016/2017

SD/ MI		SLTP/ MTS		SMA/ MA	
APK	APM	APK	APM	APK	APM
105,37	97,18	100,4	79,58	74,24	56,6

(Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017)

Tabel di atas terdapat data yang berisi APK dan APM dari SD sampai SMA dari tahun 2015/ 2016 hingga 2016/ 2017 di Kabupaten Majalengka. Isi dari tabel tersebut kita dapat melihat APK SD di tahun 2015/ 2016 mengalami penurunan dari 109,01 menjadi 105,37 di tahun 2016/ 2017, lalu pada jenjang SMP mengalami peningkatan dari 100,36 pada tahun 2015/ 2016 menjadi 100,40 di tahun 2016/ 2017 berbeda

dengan jenjang sebelumnya, dan yang terakhir pada tingkat SMA Angka Partisipasi Kasar mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 63,44 di tahun 2015/ 2016 menjadi 74,24 di tahun 2016/ 2017. Selain APK, tabel diatas juga menunjukkan APM Sekolah di Kabupaten Majalengka, dimana APM SD di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015/ 2016 sekitar 96,35 meningkat menjadi 97,18 di tahun 2016/ 2017, sedangkan APM SMP mengalami penurunan dari 82,54 di tahun 2015/ 2016 menjadi 79,58 pada tahun 2016/ 2017, dan yang terakhir APM SMA di Kabupaten Majalengka juga mengalami peningkatan dari 43,20 di tahun 2015/ 2016 menjadi 56,60 di tahun 2016/ 2017. Bila dilihat dari perkembangan APK dan APM SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Majalengka, maka peluang yang dimiliki dalam melaksanakan dan pencapaian wajib belajar 12 Tahun di daerah ini juga semakin besar, apalagi bila dilihat dari pencapaian APK dan APM nya sudah hampir mencapai 100 persen, Cuma yang menjadi masalah hanya pencapaian APK sekolah menengah yang masih di bawah rata-rata APK sekolah menengah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah daerah setempat mempunyai program-program untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Selain di bawah ini terdapat data tentang jumlah sekolah dari berbagai jenjang dari sekolah regular dan madrasah di Kabupaten Majalengka.

Tabel 3
Jumlah Sekolah SD/MI, SMP/ Mts, dan SMA/SMK/MA dari Tahun 2014-2016

Sekolah	2014	2015	2016
SD	802	666	666
MI	74	78	80
SMP	101	102	104
MTs	71	79	80
SMA	20	22	22
SMK	52	49	53
MA	26	28	31

(Sumber : BPS Kabupaten Majalengka dalam Angka Tahun 2016 dan 2017)

Jumlah sekolah menengah yang selalu bertambah tiap tahunnya, dapat menampung siswa lulusan SMP di Kabupaten Majalengka. Jumlah sekolah SMA bertambah dari tahun 2014 sampai saat ini, tetapi jumlah sekolah SMK sempat mengalami pengurangan dari tahun 2014 ke 2015, tetapi kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan kembali.

Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka juga selalu mendukung agar selalu terjadi peningkatan APK untuk setiap jenjangnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang seharusnya menjadi fokus adalah untuk bagaimana cara untuk meningkatkan APK sekolah menengah di Kabupaten Majalengka. Maka dari itu Dinas Kabupaten Majalengka telah membentuk tim untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah, yaitu TAWAS (Tim Akselerasi Wajib Belajar 12 Tahun). Akan tetapi pada saat ini pengelolaan sekolah menengah pada saat ini, sudah beralih ke Dinas Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu Dinas Provinsi juga turut mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam upaya meningkatkan APK sekolah menengah, sehingga wajib belajar 12 tahun dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif dengan

menggunakan Studi Kasus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini dimulai dengan cara mendapatkan informasi terkait pelaksanaan wajib belajar di Kabupaten Majalengka melalui beberapa proses dengan langsung terjun kelapangan. Dalam metode ini diharapkan diperoleh data dan informasi yang sebenarnya terkait upaya pelaksanaan kearah wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka dan dapat mengetahui beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai program, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Setelah mendapatkan informasi yang berkaitan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) atau menganalisis lingkungan internal yang berupa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki daerah kemudian juga melakukan analisis eksternal yang berupa peluang dan tantangan yang dimiliki daerah. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi perusahaan. Jadi analisis ini digunakan untuk mencari strategi dan solusi terbaik agar mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun di Majalengka.

Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi aktif. Prosedur pengumpulan datanya dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data yang sudah ada pada instansi-instansi (BPS, Disdik, Kemenag) sumber data yang bersifat dokumentasi.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis setelah pengumpulan data adalah pengembangan system kategori pengkodean, penyortiran data dan perumusan kesimpulan.

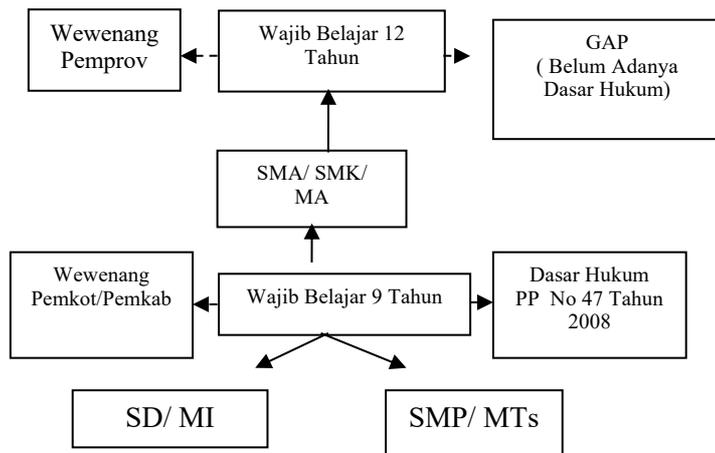
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil temuan, bahwa di Kabupaten Majalengka masih belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun, dikarenakan, belum mempunyai payung hukum yang kuat, yang dapat mengatur dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka. Berbeda dengan Program wajib belajar 9 tahun, yang mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Strategi Dalam Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Majalengka

Wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam agenda Nawacita melalui Program Indonesia Pintar dengan dasar hukum Permendikbud No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Namun pada kenyataannya belum semua daerah memiliki payung hukum untuk program tersebut (termasuk Kabupaten Majalengka) sehingga program wajib

belajar belum dilaksanakan dengan maksimal. Berikut gambaran wajib belajar di Kabupaten Majalengka:



Gambar 1
Alur Pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Majalengka

Berdasarkan gambar diatas, pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Majalengka, sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Sedangkan untuk pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka, masih terkendala dengan belum adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka merupakan agenda yang tertulis pada RPJMD Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, melalui strategi-strategi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka.

Manajemen Strategis Wajib Belajar di Kabupaten Majalengka

Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan misi dalam menetapkan kualitas

pelayanan pendidikan untuk mencapai visi Kabupaten Majalengka yang maju dan sejahtera berlandaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Selanjutnya untuk mencapai misi tersebut, terdapat beberapa sasaran. Sasaran yang pertama adalah untuk meningkatkan akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Penggunaan manajemen strategis dalam penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2012), menurutnya manajemen strategis dalam pendidikan adalah suatu proses dinamik yang dilakukan oleh suatu organisasi pendidikan yang berlangsung secara terus menerus yang melahirkan strategik dan serangkaian keputusan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan produk atau output pendidikan yang mampu menampilkan kinerja dan prestasi tinggi, sesuai dengan sasaran organisasi yaitu tercapainya visi dan misi. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menggunakan manajemen strategis dalam mencapai visi dan misinya.

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan manajemen strategis telah berhasil dalam memberikan kontribusinya, salah satunya adalah bahwa manajemen strategis telah berhasil dalam mencapai visi dan misi SMPN 2 Mataram dalam membentuk manusia yang berkualitas, hal ini merujuk kepada pendidikan karakter (Irawan, dkk, 2014). Sebagaimana dalam penelitian lain disebutkan bahwa manajemen strategis juga telah menjadi tools dalam

meningkatkan kualitas pendidikan di Spanyol (Latorre & Blanco, 2013).

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Program Wajib Belajar di Kabupaten Majalengka

Kemudian peneliti juga telah menemukan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal yang merupakan peluang dan tantangan yang dapat

mempengaruhi pencapaian wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka, yang dapat dilihat seperti dibawah ini.

Dibawah ini merupakan tabel IFAS dan EFAS yang digunakan untuk menganalisis Faktor lingkungan internal dan eksternal Majalengka dalam upaya pelaksanaan kearah wajib belajar 12 tahun.

Tabel 4
Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) Kabupaten Majalengka

Faktor strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x rating
Kekuatan			
1. APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA sederajat selalu meningkat setiap tahunnya.	0.15	2	0,3
2. Telah tersedianya jumlah SMA yang memadai untuk menampung lulusan SMP.	0,05	2	0,1
3. Mempunyai Tim Akselerasi Wajib Belajar 12 Tahun di Majalengka.	0,10	3	0,3
4. Jumlah sekolah dan madrasah yang selalu meningkat setiap tahunnya.	0,05	2	0,1
5. Guru-guru di Majalengka rata- rata mempunyai ijazah S1.	0,05	1	0,05
6. APK Pendidikan Dasar di Kabupaten Majalengka hampir mencapai 100 persen.	0,10	2	0,2
7. Pemerintah daerah mendukung penuh dalam peningkatan mutu pendidikan.	0,10	2	0,2
Total skor kekuatan			1,25
Kelemahan			
1. Masih terdapat gedung sekolah yang mengalami kerusakan.	0,10	3	0,3
2. Masih terdapat sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan pendidikan.	0,05	4	0,2
3. Masih rendahnya kesejahteraan guru honorer.	0,10	2	0,2
4. Masih rendahnya APK sekolah menengah di Majalengka dan masih di bawah rata- rata APK Provinsi Jawa Barat.	0,10	3	0,3
5. Madrasah di Majalengka tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.	0,05	2	0,2
6. Rata-rata pendidikan penduduk (50,20%) SD	0,05	3	0,15
Total skor kelemahan	1,00		1,35
Selisih skor kekuatan dan kelemahan			-0,1

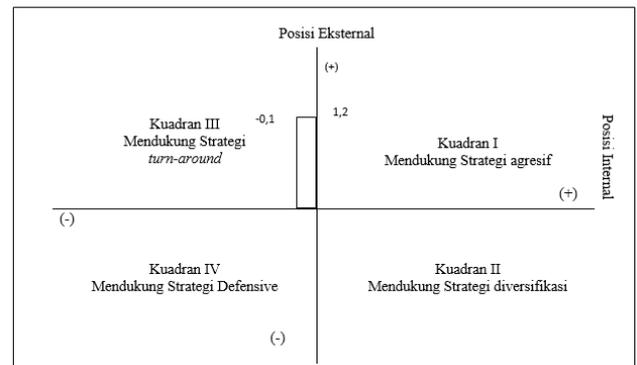
Tabel 5
Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Kabupaten Majalengka

Faktor strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot X rating
Peluang			
1. Meningkatnya APBD Majalengka sebesar 12,43 persen di tahun 2018 dari tahun sebelumnya.	0,1	3	0,3
2. Adanya UU yang mengatur perim-bangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terutama tentang bagi hasil SDA.	0,1	3	0,3
3. Penduduk Majalengka mempunyai penghayatan keagamaan yang cukup tinggi.	0,05	2	0,1
4. Setiap jenjang sekolah mendapatkan dana BOS.	0,1	4	0,4
5. Terjadinya peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) setiap tahunnya	0,05	3	0,15
6. Di madrasah yang ada di Majalengka masih diperbolehkan untuk mendapatkan infaq dari orang tua murid sesuai dengan PMA.	0,1	3	0,3
7. Akan adanya Bandara Internasional di Majalengka sehingga membutuhkan banyak lapangan kerja dari penduduk asli daerah.	0,1	3	0,3
Total skor peluang	1,85		

Tantangan			
1. Dukungan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Majalengka Masih rendah khususnya di wilayah pedesaan.	0,1	1	0,1
2. Belum adanya Perda terkait pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka.	0,1	1	0,1
3. Sektor pembiaayaan pendidikan yang semakin meningkat.	0,1	2	0,2
4. Krisis ekonomi yang masih dirasakan sebagian penduduk Majalengka	0,05	2	0,1
5. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya	0,05	3	0,15
Total skor tantangan	1,00		0,65
Selisih skor peluang dan tantangan	1,00		1,2

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Matriks IFAS dan EFAS diketahui bahwa:

1. Pada tabel IFAS diperoleh penjumlahan skoring faktor-faktor kunci yang ternyata merupakan kekuatannya lebih kecil dari pada penjumlahan skoring faktor-faktor kunci kelemahan yaitu $1,25 < 1,35$. Hal ini berarti apabila Kabupaten Majalengka akan menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun, maka pemerintah setempat hendaknya lebih memfokuskan strateginya pada kegiatan-kegiatan yang meminimalkan kendala-kendala internal dan tidak pada hal-hal yang bersifat ekspansif.
2. Sedangkan pada tabel EFAS diperoleh penjumlahan skoring faktor-faktor kunci yang ternyata merupakan peluangnya lebih besar dari pada penjumlahan skoring faktor-faktor kunci tantangan yaitu $1,85 > 0,65$. Hal ini berarti peluang untuk menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi.



Gambar 4.2. Matriks *Grand Strategy* Kabupaten Majalengka

Posisi Kabupaten Majalengka bila digambarkan dengan Matriks *Grand Strategy* berada pada Kuadran III, dengan karakteristik:

1. Organisasi mempunyai peluang yang besar tetapi juga mempunyai beberapa kelemahan yang harus diperhatikan.
2. Karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, kecuali dapat meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi.
3. Fokus strategi organisasi pada posisi ini ialah mengatasi kelemahan-kelemahan atau meminimalkan kendala-kendala internal.

Dengan posisi organisasi pada kuadran III, maka Kabupaten Majalengka perlu melakukan: (1) Melengkapi dan memperbaiki fasilitas dan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM, (2) Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru didaerah terpencil dan

memberikan reward untuk guru yang berprestasi (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolhkannya, dengan melakukan gerakan terpadu program wajib belajar 12 tahun dengan melibatkan semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usaha, sehingga pelaksanaan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial .

Mencermati hasil pengolahan data yang disajikan maka Strategi yang dapat digunakan dalam upaya pelaksanaan kearah wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka adalah, yaitu:

1. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan , yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya, antara lain a) Menyusun database pendidikan dan Rencana Strategis Pendidikan 2018-2022 baik di Dinas Pendidikan dan di Kemenag Majalengka, b) Menambahkan jumlah ruang kelas di SMK, c) Menambahkan jumlah ruang kelas di madrasah, d) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan globalisasi dengan memanfaatkan teknologi, e) Semua madrasah harus memenuhi standar nasional Pendidikan, f) Memberikan beasiswa untuk siswa yang hafal al-Qur'an, dan g) Menetapkan standar minimal lulusan SMA sederajat , untuk bekerja di bandara .

2. Strategi ST

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi tantangan, antara lain a) Mengadakan sosialisai tentang pentingnya pendidikan dan wajib belajar 12 tahun oleh tim akselerasi

wajib belajar 12 tahun, b) Membuat Peraturan daerah penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Majalengka dan c) Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

3. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, yaitu a) melengkapi dan memperbaiki fasilitas dan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM, b) mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru didaerah terpencil dan memberikan reward untuk guru yang berprestasi dan c) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolhkannya.

4. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari tantangan dengan langkah a) menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan skala prioritas dan b) mengembangkan pola atau model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah menghasilkan beberapa strategi yang sudah dikemukakan sebelumnya, ada 6 strategi alternatif yang harus di utamakan dalam pelaksanaannya. Strategi- strategi tersebut sebagai berikut.

1. Membuat Peraturan daerah penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Majalengka.

2. Mengembangkan pola atau model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru di daerah terpencil dan memberikar reward untuk guru yang berprestasi.
4. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan wajib belajar 12 tahun oleh tim akselerasi wajib belajar 12 tahun.
5. Memberikan beasiswa untuk siswa yang hafal al-Qur'an.
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Kabupaten Majalengka masih belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun, dikarenakan, belum mempunyai payung hukum yang kuat, yang dapat mengatur dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka. Berbeda dengan Program wajib belajar 9 tahun, yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Tetapi meskipun belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun, Kabupaten Majalengka sudah melaksanakan pendidikan menengah universal, yang merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun.

Kabupaten Majalengka terdapat 12 faktor internal yang terdiri dari 7 kekuatan dan 5 kelemahan dalam upaya pencapaian wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, terdapat 11 faktor yang terdiri dari 7 peluang dan 4 tantangan dalam upaya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka.

Menyediakan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah sesuai dengan model

pendidikan yang dibutuhkan, baik formal (umum dan kejuruan) maupun nonformal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin, keluarga marginal dan yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil, dan pedalaman. Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru di daerah terpencil dan memberikar reward untuk guru yang berprestasi. Memperbanyak sekolah yang sesuai dengan standar nasional, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk penyediaan ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan penambahan lokal/ruang kelas baru disertai dengan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten
Majalengka.(2016). *Kabupaten
Majalengka dalam Angka Tahun 2016*.
Majalengka: Badan Pusat Statistik
Kabupaten Majalengka
- Badan Pusat Statistik Kabupaten
Majalengka.(2017). *Kabupaten
Majalengka dalam Angka Tahun 2017*.
Majalengka: Badan Pusat Statistik
Kabupaten Majalengka
- Berlian, N.V.A. (2011). Faktor-faktor yang terkait
dengan rendahnya pencapaian wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun. *Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan*, 17 (1), hlm.
43-55.
- Firmansyah, F. & Sumarno. (2013). Perkembangan
wajib belajar 9 tahun di Indonesia periode
1994-2008. *AVATARA, e-Journal
Pendidikan Sejarah*, 1(2), hlm. 198-203.
- Hasanah, M.Y. & Jabar, C.S.A. (2017). Evaluasi
program wajib belajar 12 tahun Pemerintah
Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal
Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5
(2), hlm, 228-239.
- Hidayat, R. (2013). Pengaruh manajemen strategik
dan biaya pendidikan terhadap daya saing
sekolah di sekolah dasar negeri se-
Kecamatan Mangkubumi Kota
Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 1
(2), hlm. 187-192.
- Irawan ,dkk , (2014). Implementasi Manajemen
Strategik Pendidikan Karakter Pendidikan
Karakter di SMPN 2 Mataram 2 Mataram.
Jurnal Paedagogy, 1(2), Hlm 113-123.
- Latorre, M, J. & Blanco F, J. (2013). Strategic
Management as Key to Improve the Quality
of Education. *Procedia - Social and
Behavioral Sciences*, 81, hlm. 23-39.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47
Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Seel, N.M. (2012). *Encyclopedia of the sciences of
learning*. New York: Springer.
- Somantri, M.(2014). *Perencanaan pendidikan*.
Bogor: IPB Press.
- Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan
dan Kebudayaan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional